

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah cara pemerintah untuk melakukan investasi yang signifikan untuk kepentingan masyarakat, memungkinkan mereka untuk hidup dan berpartisipasi dalam politik. Definisi yang berbeda dari kebijakan publik disediakan oleh Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2012:119) adalah suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practice*).

Sementara Hogwood & Gunn (Hayat, 2018:14) berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 9 definisi yaitu:

- 1) Kebijakan menjadi suatu tanda bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*). Merek atau label kebijakan menjadi program terstruktur dan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam kebijakan.
- 2) Kebijakan didefinisikan sebagai pernyataan yang mendefinisikan tujuan yang luas atau persyaratan tertentu (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*). Keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum atau masyarakat untuk mengatasi masalah yang akan menguntungkan masyarakat atau memecahkan masalah.
- 3) Kebijakan menjadi beberapa usulan khusus (*as specific proposals*). Saran khusus yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang datang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.

- 4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*). Apapun langkah yang diambil pemerintah dalam membuat penilaian adalah kebijakan publik. Serupa dengan bagaimana keputusan pemerintah untuk diam adalah bentuk kebijakan publik.
- 5) Kebijakan sebagai bentuk metode verifikasi formal (*as formal authorization*). Kebijakan yang bersifat pengesahan resmi sama dengan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan berkedok peraturan perundang-undangan.
- 6) Kebijakan sebagai program (*as programme*). Program pemerintah termasuk dalam kebijakan publik, setiap inisiatif pemerintah baik resmi maupun tidak resmi dapat dikategorikan sebagai kebijakan..
- 7) Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*). Begitu juga dengan hasil kebijakan yang merupakan hasil akhir dari program kerja yang telah dilaksanakan. Kebijakan tersebut mencakup hasil akhir dari program atau pekerjaan pemerintah.
- 8) Kebijakan sebagai salah satu teori ataupun model (*as a theory or model*). Kajian dan analisis terhadap berbagai isu pemerintahan menghasilkan berbagai keluaran atau outcome yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memandu kebijakannya.
- 9) Kebijakan sebagai suatu proses (*as process*). Sebuah prosedur menghasilkan hubungan kebijakan satu sama lain, suatu keputusan atau kebijakan dihasilkan melalui proses kebijakan publik yang berlangsung terus menerus.

Birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan publik, tiga jenis kebijakan publik meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan publik dan evaluasi kebijakan. Tujuan dari kebijakan yang telah dikembangkan bersifat spesifik. Dalam konteks ini diterima bahwa jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka akan gagal (Muadi, MH, & Sofwani, 2016). Sebagai hasil dari kebijakan publik, legislasi merupakan barang publik dan komoditas politik yang mempengaruhi perhatian publik. Di sisi lain, dinamika yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut satu sudut pandang kebijakan publik harus responsif, fleksibel dan terukur terhadap dinamika pembangunan yang berubah (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

### **2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (Abdal, 2015: 46-47) karakteristik unik dari kebijakan publik berasal dari fakta bahwa ia dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mencapai tujuan daripada menjadi perilaku atau tindakan yang terjadi secara tidak sengaja. Kebijakan publik dalam sistem politik saat ini mengacu pada tindakan yang telah direncanakan.
- 2) Pejabat pemerintah menerapkan kebijakan yang pada dasarnya adalah penilaian otonom yang terdiri dari tindakan yang saling berhubungan dan berpola yang mengarah dalam memenuhi suatu tujuan. Kebijakan juga harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang implementasi dan penegakannya karena tidak cukup hanya memutuskan membuat peraturan.
- 3) Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang dibuat berdasarkan apa yang

benar-benar dicapai oleh pemerintah dibidang tertentu.

- 4) Setiap keadaan tertentu di mana keterlibatan pemerintah diperlukan, kebijakan publik mungkin melibatkan keputusan oleh otoritas pemerintah untuk ikut campur tangan atau tidak bertindak (Abdal, 2015:46).

### **2.1.3 Tahap-tahap Pengambilan Kebijakan Publik**

Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan dalam tahapan proses kebijakan publik atau pemerintah. Sebelum melangkah ke langkah pengembangan kebijakan, dilakukan pada tahap agenda setting. Saat membuat kebijakan penting untuk mempertimbangkan proses ini agar kebijakan tersebut tidak jatuh atau berubah menjadi omong kosong, apalagi jika membuat kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru (Alamsyah, 2016:48-50) mengemukakan bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Perumusan Masalah

Memahami masalah dapat membantu dalam mengungkapkan asumsi yang mendasari, menemukan penyebab, menguraikan tujuan potensial, menggabungkan hasil pengalaman, dan menciptakan pilihan kebijakan baru. Pemahaman yang kuat dan identifikasi masalah akan membantu persiapan perencanaan kebijakan. Mereka yang terkena dampak masalah, serta individu yang bertanggung jawab lainnya dan pengambil keputusan dengan otoritas yang diperlukan dan merumuskan masalah.

- 2) Agenda Kebijakan

Hanya sedikit yang menarik perhatian politisi karena ada begitu banyak masalah umum, pilihan dan preferensi perhatian pembuat kebijakan membentuk

agenda kebijakan. Setiap topik bersaing dengan topik lain yang pada akhirnya menjadi agenda kebijakan dan berpotensi untuk dimasukkan.

### 3) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Langkah selanjutnya adalah menemukan solusi setelah masalah publik didefinisikan secara tepat dan diputuskan untuk menjadi agenda kebijakan. Merumuskan rekomendasi kebijakan adalah proses mengumpulkan dan membuat serangkaian langkah yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah (Proposal Kebijakan). Dalam hal ini pemain yang berkepentingan dengan hasil berkompromi dan bernegosiasi untuk mencapai kesimpulan kebijakan.

### 4) Tahap Penetapan Kebijakan

Langkah terakhir bagi pembuat kebijakan adalah menyusun kebijakan yang memiliki akibat hukum setelah salah satu pilihan kebijakan diputuskan untuk digunakan untuk mengimplementasikan usulan tersebut. Proses pembentukan atau pengesahan kebijakan harus terkait erat dengan proses pembuatan kebijakan. Saling menyesuaikan dan menerima standar dan prinsip yang diakui adalah bagian dari proses persetujuan kebijakan.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle (Abdullah, 2016:57) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan praktis melalui jalur birokrasi. Isu-isu lain seperti konflik, pengambilan keputusan, dan proses memperoleh kebijakan semuanya relevan. Implementasi adalah proses memantau bagaimana kebijakan dijalankan setiap hari untuk memastikan pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Apakah semua rencana telah dijalankan sesuai dengan

prosedur? Apa yang telah dicapai atau disumbangkan kepada masyarakat luas? Apakah ada teknik yang lebih efisien untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas?

Dalam gagasan upaya penilaian yang disebut sebagai implementasi kebijakan oleh (Mazmanian dan Sabatier, 2013) disebut tindakan yang diambil untuk menjamin bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya. Definisi mendasar dari implementasi diberikan oleh Lane yang mengklaim bahwa itu dapat dibagi menjadi dua bagian implementasi adalah persamaan fungsional dari maksud, keluaran dan hasil. Menurut uraian tersebut, rumusan pelaksanaan adalah suatu proses yang meliputi maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil sebagai akibat. Persamaan implementasi juga memperhitungkan waktu kebijakan, formator, implementor, dan inisiator. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12) Implementasi adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoperasionalkan keputusan dan mengimplementasikan setiap perubahan besar atau kecil yang telah disepakati sebelumnya. Mengetahui apa yang harus terjadi setelah perangkat lunak diinstal adalah tujuan implementasi. Implementasi dalam konteks ini mengacu pada proses menempatkan keputusan mendasar ke dalam tindakan, proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

Pembenaran lain untuk implementasi kebijakan dapat ditemukan dalam pernyataan Grindle dan Quade, yang bertujuan untuk menunjukkan konfigurasi dan saling ketergantungan dari tiga faktor hubungan segitiga antara variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Harapan tersebut harus diwujudkan oleh masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai. Selain itu, organisasi pelaksana harus membuat akomodasi untuk kebijakan yang dipilih setelah diidentifikasi karena memiliki kekuatan dan sumberdaya untuk membantu pelaksanaan program atau kebijakan. Sementara itu, situasi dan keadaan lingkungan kebijakan harus dibentuk dengan benar dan memiliki pengaruh positif dan negatif agar dapat berdampak.

Oleh karena itu, persepsi positif terhadap suatu kebijakan di lingkungan akan menghasilkan dukungan positif, yang akan berdampak pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Konflik sikap akan muncul dan proses implementasi akan terancam, namun jika lingkungan memiliki pandangan negatif. Selain ketiga persyaratan ini, menjaga kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan sebagai akibat langsung dari penerapan kebijakan yang menilai dampak sosialnya juga diperlukan. Untuk memastikan kelompok sasaran kebijakan mematuhi kebijakan, diperlukan implementasi kebijakan. Akibatnya, dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor kunci dalam menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yakni “(1) unsur pelaksana, (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) kelompok sasaran” adalah faktor yang harus ada untuk pelaksanaan kebijakan. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah unit administrasi atau unit birokrasi dengan frasa “organisasi pelaksana” yang menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah bertugas menyelenggarakan program-program publik. Menurut (Ripley & Grace A. Franklin, 2019:84) bahwa: *“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*, artinya hal ini menunjukkan bahwa divisi birokrasi ini memiliki pegangan yang kuat tentang bagaimana program dan kebijakan diimplementasikan. Mereka memiliki peran utama tetapi tidak menentukan dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan inisiatif (Mirza, 2019:84).

Rencana pelaksanaan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan implementasi kebijakan, dan proyek yang ditargetkan kemudian direncanakan dan didanai. Kebijakan atau program dilaksanakan sesuai dengan rencana, artinya baik isi kebijakan maupun lingkungan di mana kebijakan itu diberlakukan berdampak pada bagaimana kebijakan atau program itu akan dijalankan. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan, hasil program berdasarkan tujuan kebijakan diukur. Perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari implementasi kebijakan digunakan untuk mengukur pengaruh program terhadap sasaran yang dituju, baik individu maupun kelompok, serta

masyarakat (Akib, 2016:3).

### 2.2.3 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan telah terpenuhi dikenal sebagai indikator implementasi kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi, pertimbangan dan pengamatan terhadap tingkat kinerja program suatu unit kerja didasarkan pada indikasi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, tidak mungkin mengevaluasi kebijakan, program, atau kegiatan secara positif atau negatif tanpa tanda-tanda implementasi kebijakan. Indikator implementasi kebijakan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya akademisi menetapkan indikator implementasi kebijakan menurut Rondinelli dan Cheema (Purwanto dan sulistyastuti, 2012:90) yakni mengidentifikasi 4 faktor implementasi kebijakan, sebagai berikut:

- 1) **Kondisi lingkungan** yaitu terjadinya kegagalan implementasi ketika kebijakan mutu diimplementasikan dalam pengaturan dan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini karena implementasi terkait dengan situasi geografis, sosial, dan ekonomi tempat pelaksanaannya.
- 2) **Hubungan antar organisasi** yaitu adanya pendampingan dan kerjasama yang sangat baik antar instansi pemerintah, terutama dalam upaya pelaksanaannya.
- 3) **Sumber daya** yaitu pelaksana membutuhkan sumber daya untuk mendukung implementasi di lapangan dan di dalam organisasi.
- 4) **Karakter Kemampuan Pelaksana** yaitu kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab badan pelaksana.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses penilaian implementasi mekanisme evaluasi berkala untuk implementasi kebijakan yang mendorong keberhasilannya diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang ditetapkan atau situasi aktual di lapangan, proses penilaian dilakukan.

#### **2.2.4 Model Implementasi Kebijakan**

Meskipun model implementasi kebijakan bersifat abstrak dan praktis, perlu kajian dan penelitian. Kerumitan tantangan kebijakan yang diteliti dan tujuan analisis mempengaruhi nilai model. Artinya teori atau model yang lebih operasional khususnya yang dapat menjelaskan secara akurat hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti diperlukan semakin kompleks dalam masalah kebijakan dan semakin mendalam kajiannya.

Selanjutnya uraian tentang model-model implementasi kebijakan bersumber dari Wahab (Abdullah, 2016:63-70):

- 1) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut *A model of the policy implementation process*.

Kedua pakar kebijakan publik tersebut mempresentasikan teori atau model mereka dengan asumsi bahwa variasi dalam proses implementasi akan tergantung pada sifat kebijakan yang diterapkan. Untuk menghubungkan masalah kebijakan dengan implementasi, idenya adalah untuk membuat model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter & Van Horn membuat tipologi kebijakan berdasarkan:

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

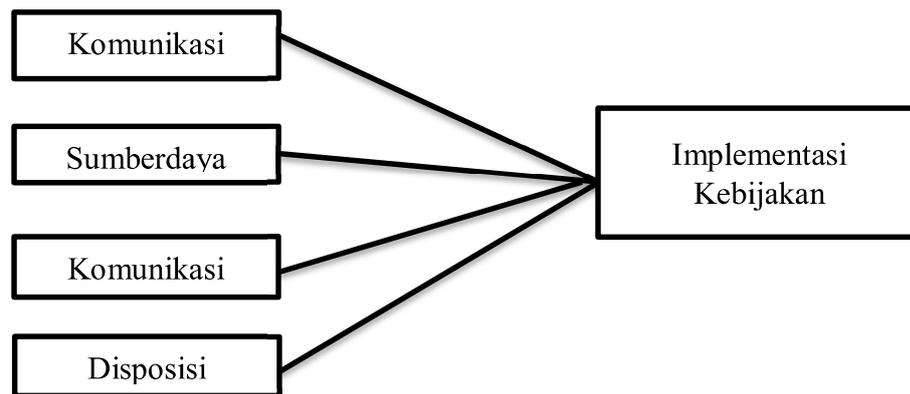
Dikemukakannya bahwa berbagai variabel independen yang saling terkait memisahkan jalan antara kebijakan dan kinerja atau prestasi kerja yakni:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan
  - b) Sumber-sumber kebijakan
  - c) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
  - d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
  - e) Sikap para pelaksana
  - f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- 2) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie, disebut *A Framework For Implementation Analysis*

Menurut dua ahli yang disebutkan di atas, sangat penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal di seluruh proses implementasi. Variabel ini dapat dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

- a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
  - b) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
  - c) Pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
- 3) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
- Antara perumusan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhi, implementasi kebijakan merupakan tahapan perumusan kebijakan. Menurut George C Edwards III (Leo, 2016:150-154), Untuk mengevaluasi situasi terbaik dan terburuk, ada empat aspek yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.



**Gambar 2. 1** Model Implementasi kebijakan menurut George C Edward III

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi menurut George C Edwards III yakni menilai apakah tujuan implementasi kebijakan publik telah berhasil dicapai. Ketika pengambil keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan implementasi menjadi efektif. Setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan dari penerapan aturan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia terkait agar pengetahuan yang akan mereka kerjakan menjadi efektif. Agar pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan lebih konsisten dalam mengadopsi setiap kebijakan yang akan diambil di masyarakat diperlukan komunikasi.

Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur variabel komunikasi tersebut yaitu:

a) Transmisi, implementasi yang baik juga dapat dicapai dengan menyalurkan

komunikasi yang baik. Kesalahpahaman sering terjadi akibat tercerai berainya komunikasi (miscommunication). Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, menyebabkan apa yang diharapkan menjadi salah di tengah jalan.

- b) Kejelasan, informasi yang diperoleh para pelaksana kebijakan harus dapat dipahami dan tidak membingungkan. ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi para pelaksana atau implementor membutuhkan keluwesan dalam menjalankan kebijakan. Namun di tingkat lain hal ini sebenarnya akan membelokkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi, untuk dapat ditentukan dan dilaksanakan, perintah pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan tidak ambigu, karena jika sering berubah-ubah, pelaksana di lapangan bisa menjadi bingung.

## 2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber Daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Sumber Daya manusia (staf), sumberdaya manusia merupakan sumber daya utama yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya sumberdaya manusia yang memadai atau tidak kompeten dalam profesinya merupakan salah satu penyebab umum kegagalan dalam implementasi kebijakan. Jumlah pegawai atau pelaksana saja tidak cukup. Sebaliknya perlu ada jumlah karyawan yang memadai dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk melaksanakan persyaratan kebijakan.
- b) Sarana dan prasarana (fasilitas), fasilitas fisik merupakan komponen penting

dalam pelaksanaan kebijakan bahkan dengan karyawan yang cukup dan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan, pelaksanaan kebijakan akan gagal tanpa infrastruktur yang diperlukan.

### 3) Disposisi (*Disposition*)

Unsur penting ketiga dalam strategi implementasi suatu kebijakan publik adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan mampu melakukannya tanpa bias. Hal yang perlu diperhatikan mengenai variabel disposisi adalah apabila pegawai yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi, maka pengangkatan birokrat disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan nyata dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu individu yang berkomitmen pada kebijakan yang telah diputuskan lebih khusus untuk kepentingan penduduk harus dipilih dan diangkat untuk posisi pegawai pelaksana kebijakan.

### 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Faktor keempat yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan adalah struktur birokrasi. Bahkan ketika sumberdaya tersedia atau ketika pelaksana kebijakan termotivasi dan sadar akan apa yang perlu dilakukan, masih ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan atau direalisasikan karena adanya kekurangan dalam proses implementasi organisasi birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, sumberdaya akan menjadi tidak efektif dan kemajuan kebijakan akan terhambat karena kebijakan sangat rumit dan bergantung pada kolaborasi banyak individu.

Untuk dapat secara efektif melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik, birokrasi harus dapat mendukungnya.

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi struktur birokrasi merupakan dua hal yang dapat meningkatkan kinerja suatu implementasi kebijakan SOP adalah prosedur reguler yang memungkinkan anggota staf untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Fragmentasi di sisi lain adalah pembagian kewajiban kebijakan di antara banyak lembaga yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi untuk memastikan bahwa setiap anggota memenuhi tugasnya sesuai dengan SOP.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

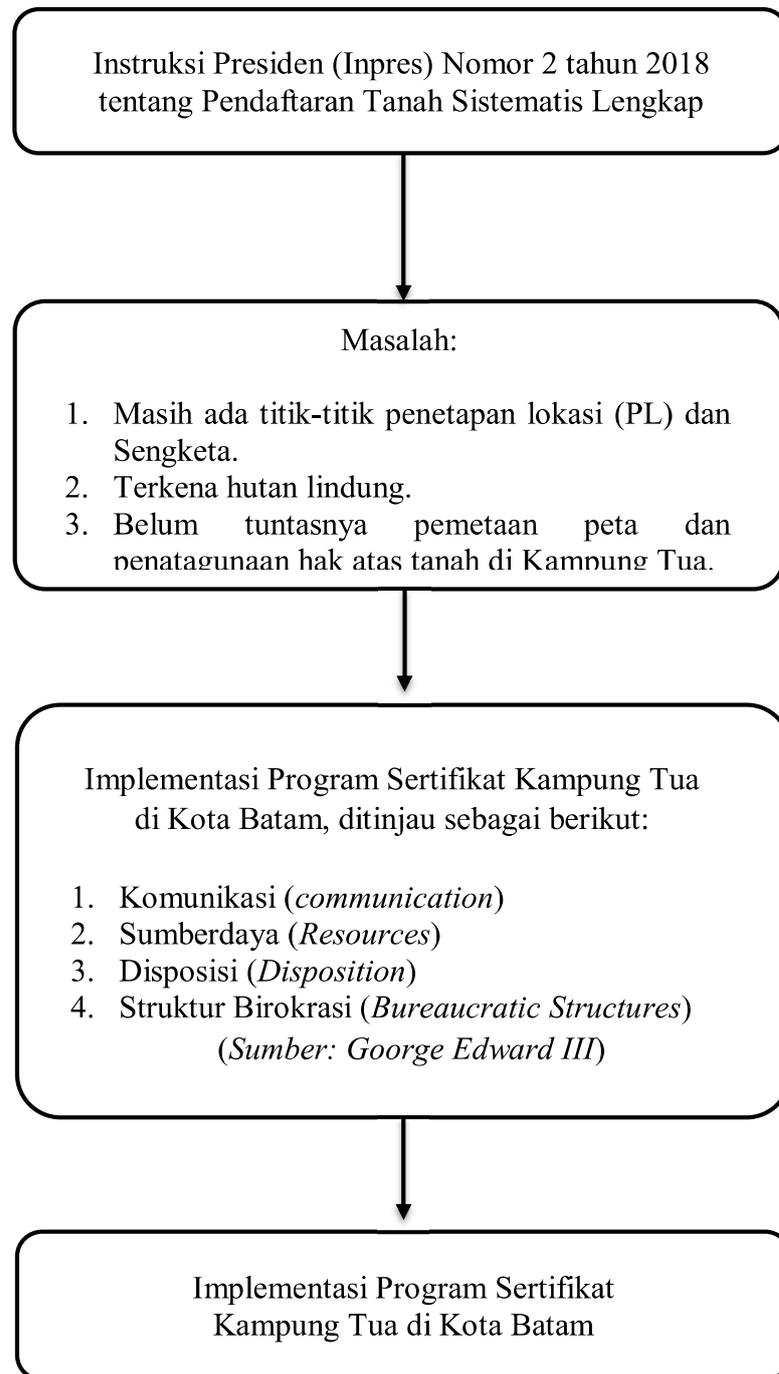
<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Nama Jurnal</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	(Kurniawan, 2018) Vol. 4 No. 1 ISSN 2460-8076	Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Hasil penelitian yakni implementasi program layanan rakyat untuk sertifikat tanah ini masih kurang efektif dilihat dari jumlah sumber daya manusianya yang kurang, waktu penyelesaian sertifikat tidak tepat waktu yang telah ditentukan.
2.	(Ipul & Prakoso, 2019) E-ISSN: 2615-3394	Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan perluasan lokasi bandara Kol. Ra.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah berjalan lancar, pemegang hak atas tanah

		Bessing Malinau	metode penelitian deskriptif kualitatif	bersedia mengikuti prosedur yang ada.
3.	(Tiffani et al., 2020) e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 3	Implementasi program keluarga berencana (KB) dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi program keluarga berencana (KB) dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi di temukan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang belum sepenuhnya berjalan baik dan efektif.
4.	(Indraningsih, 2019) Volume 1 Nomor 1, Juni 2019 : hal 31-40 E-ISSN : 2685-7170 P-ISSN : 2685-8789	Implementasi Kebijakan pembangunan pariwisata Kota Palu	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa model kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga implementasi kebijakan ini belum optimal
5.	(Fitri & Yusran,	Implementasi	Penelitian ini	Hasil penelitian

	2020) (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020	Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator.
6.	(Misbak, 2018) ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398	Implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Kota Cirebon bagi nelayan Kota Cirebon menemui hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan.
7.	(Warni, Siregar, & Lodan, n.d, 2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sagulung)	Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya efektif tetapi tidak berjalan efisien karena manfaat yang belum merata.
8.	(Suseno, Handoko, Kusbandrijo, & Nasution, 2021) ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) Vol.11, No.10, 2021	Implementation of Policy for the Use of Village Fund (Study on the Implementation of The Village Funds in Durungbanjar Village, Candi District, Sidoarjo)	This study uses a descriptive qualitative approach.	The results of this study indicate that the implementation of the use of the Village Funds in Durungbanjar Village, Candi District, Sidoarjo Regency has been carried out through

		Regency)		stages that are influenced by leadership factors, community participation, village organizations, and village head examinations.
9	(Eko, Coresponding, & Widodo, 2019) ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) DOI: 10.7176/PPAR Vol.9, No.6, 2019	Implementasi kebijakan program CSR di Kota Mataram (Study Arranging Implementation Policy Model of CSR in Community Empowerment)	This study uses a descriptive approach	The findings of this study indicate that CSR policy implementation is seen as a potential that can be optimized as an alternative source of development funding, CSR policies have been implemented with reference to the Van Meter and Van Horn public policy models.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 2** Kerangka Pemikiran